

**ANALISIS DINAMIKA SOSIAL DALAM KEWIRAUSAHAAN
DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI EKONOMI*****ANALYSIS OF SOCIAL DYNAMICS IN ENTREPRENEURSHIP
FROM THE PERSPECTIVE OF ECONOMIC SOCIOLOGY***

Muhammad Syafri¹
Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Amanah
Makassar¹
Email:
muhammadsyafri7@gmail.com

Muhammad Syukur²
Universitas Negeri
Makassar²
Email:
muhammadsyukur@unm.ac.id

Firdaus W. Suhaeb³
Universitas Negeri
Makassar³
Email:
firdaus.w.suhaeb@unm.ac.id

Abstrak: Kewirausahaan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, faktor sosial turut memengaruhi perkembangan kewirausahaan, termasuk jaringan sosial, budaya kewirausahaan, pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Pemahaman mengenai dinamika sosial dalam kewirausahaan dari perspektif sosiologi ekonomi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan usaha yang inklusif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah metode literatur review dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal akademik, dan laporan penelitian yang membahas hubungan antara kewirausahaan dan faktor sosial di Indonesia. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi pola serta tantangan dalam pengembangan kewirausahaan berbasis sosiologi ekonomi. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa jaringan sosial memainkan peran penting dalam pengembangan usaha dengan memberikan akses terhadap modal dan informasi pasar. Budaya kewirausahaan di Indonesia, yang didukung oleh nilai gotong royong, turut berkontribusi dalam mendorong kewirausahaan. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengubah persepsi masyarakat yang lebih mengutamakan pekerjaan formal sebagai simbol status sosial. Pendidikan kewirausahaan telah berkembang tetapi masih menghadapi kesenjangan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kebijakan pemerintah seperti pembiayaan mikro dan program pengembangan UMKM berperan dalam meningkatkan jumlah wirausahawan, meskipun masih terdapat ketidakmerataan akses. Dinamika sosial dalam kewirausahaan sangat dipengaruhi oleh jaringan sosial, budaya kewirausahaan, pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan sinergi antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan pemberdayaan ekonomi yang lebih inklusif, terutama bagi daerah terpencil. Selain itu, program pendidikan kewirausahaan harus lebih ditingkatkan agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Masyarakat juga perlu didorong lebih terbuka terhadap kewirausahaan sebagai pilihan karier yang strategis.

Kata Kunci: **Dinamika Sosial, Kewirausahaan, Sosiologi Ekonomi, Budaya Kewirausahaan, Jaringan Sosial.**

Abstract: Entrepreneurship plays an important role in driving economic growth, especially in developing countries like Indonesia. However, social factors also influence the development of entrepreneurship, including social networks, entrepreneurial culture, education and government policies. Understanding the social dynamics of entrepreneurship from an economic sociology perspective is necessary to promote inclusive and sustainable business growth. The method used is a literature review method with a qualitative approach. Data were collected from various references, such as books, academic journals, and research reports that discuss the relationship between entrepreneurship and social factors in Indonesia. Descriptive analysis was conducted to identify patterns and challenges in the development of entrepreneurship based on economic sociology. The results of the literature review show that social networks play an important role in business development by providing access to capital and market information. The entrepreneurial culture in Indonesia, supported by the value of gotong royong, contributes to encouraging entrepreneurship. However, there are still challenges in changing people's perceptions that prioritize formal employment as a symbol of social status. Entrepreneurship education has grown but still faces a quality gap between urban and rural areas. Government policies such as microfinance and MSME development programs play a role in increasing the number of entrepreneurs, although there is still inequality of access. Social dynamics in entrepreneurship are strongly influenced by social networks, entrepreneurial culture, education and government policies. To create an inclusive and sustainable entrepreneurial ecosystem, synergy between individuals, communities and government is needed. The government needs to strengthen economic empowerment policies that are more inclusive, especially for remote areas. In addition, entrepreneurship education programs should be improved to be more relevant to market needs. People also need to be encouraged to be more open to entrepreneurship as a strategic career choice.

Keyword: **Social Dynamics, Entrepreneurship, Economic Sociology, Entrepreneurial Culture, Social Networks.**

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol. 5, No. 2, pp. 112-120
Maret 2025

PENDAHULUAN

Kewirausahaan sosial telah menjadi salah satu pendekatan utama dalam mengatasi berbagai tantangan sosial di seluruh dunia (Canestrino et al., 2020; Dees, 2007; Kickul & Lyons, 2020; Saragih, 2017; Sofia, 2017). Konsep ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga menempatkan dampak sosial sebagai inti dari operasinya. Sebagai penggerak perubahan, kewirausahaan sosial menawarkan solusi inovatif terhadap isu-isu seperti kemiskinan, kesenjangan pendidikan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks global, peran kewirausahaan sosial semakin relevan seiring dengan upaya kolektif untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 (Abduh et al., n.d.; Diaz-Sarachaga & Ariza-Montes, 2022; Sakinah et al., 2023; Schmiedeknecht, 2020).

Kemiskinan adalah masalah utama di Indonesia dan juga di banyak negara berkembang (Zulfa et al., 2020; Erawan et al., 2021; Rafi'i & Zaid, 2021). Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan beberapa individu dalam mengelola kehidupan mereka dengan efektif, sesuai dengan norma-norma yang dianggap layak untuk menjaga martabat manusia (Purnama, 2017). Dampak dari kondisi ini adalah menurunnya kualitas sumber daya manusia, yang berujung pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan pendapatan yang tidak memadai.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi di semua sektor, mendorong pembangunan yang merata dan efisien, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Kemiskinan menjadi hambatan besar bagi kemajuan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan pembangunan global, penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta pemerataan pendapatan (Wijayanto, 2010). Pemerintah Indonesia memahami bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan (Zaid & Fikri Aufa, 2022). Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembangunan di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang terus meningkat. Setiap daerah memiliki prioritas dan kebutuhan yang berbeda, yang diperhitungkan dalam merancang strategi pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, pengurangan kemiskinan menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan nasional. Efektivitas dalam menurunkan angka kemiskinan akan menjadi dasar utama dalam menentukan sektor mana yang menjadi fokus pembangunan nasional. Secara keseluruhan, kriteria utama untuk memilih sektor prioritas pembangunan adalah seberapa besar kontribusinya dalam mengurangi kemiskinan (Wijayanto, 2010).

SDGs terdiri dari 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, pemberantasan kelaparan, akses terhadap pendidikan berkualitas, dan aksi terhadap perubahan iklim (Ain et al., 2024; Andrianarison, 2022; Davarpanah et al., 2023; Halkos & Gkampoura, 2021; Kundu & Gupta, 2024; Lile et al., 2023; Pérez-Peña et al., 2021; Soltau, 2021). Tujuan-tujuan ini dirancang untuk mendorong kolaborasi global dalam menciptakan dunia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kewirausahaan sosial dianggap sebagai alat yang efektif untuk mendukung pencapaian SDGs karena

kemampuannya dalam mengintegrasikan inovasi, nilai-nilai sosial, dan model bisnis yang berkelanjutan. Sebagai contoh, berbagai inisiatif kewirausahaan sosial telah berhasil menciptakan solusi konkret untuk meningkatkan akses air bersih, energi terbarukan, dan peluang kerja bagi komunitas yang terpinggirkan.

Literatur tentang kewirausahaan sosial telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama dua dekade terakhir (Al-Qudah et al., 2022; Anh et al., 2022; Cardella et al., 2020; Gupta et al., 2020; Rosca et al., 2020). Banyak peneliti dan praktisi yang mulai mengeksplorasi konsep, strategi, dan dampak kewirausahaan sosial di berbagai konteks. Namun, meskipun pertumbuhan literatur ini cukup pesat, terdapat kebutuhan untuk memahami dinamika penelitian di bidang ini secara lebih sistematis.

Kewirausahaan bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga fenomena sosial yang berkembang dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kewirausahaan dipandang sebagai hasil dari interaksi sosial, nilai budaya, dan struktur ekonomi yang membentuk dinamika sosial dalam dunia bisnis. Proses kewirausahaan tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh jaringan sosial, modal sosial, norma, dan institusi yang berkembang dalam masyarakat (Granovetter, 1985). Dalam konteks ini, dinamika sosial dalam kewirausahaan mencerminkan bagaimana individu dan kelompok beradaptasi serta berinovasi dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Jaringan sosial, misalnya, berperan penting dalam memberikan akses terhadap sumber daya, peluang pasar, serta informasi yang mendukung keberhasilan usaha (Burt, 1992).

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, kewirausahaan sering kali berkembang dalam kerangka ekonomi informal yang dipengaruhi oleh hubungan sosial dan kepercayaan antarindividu (Geertz, 1963). Kepercayaan dan norma sosial yang

berlaku dalam komunitas tertentu memengaruhi cara pelaku usaha mengambil keputusan serta mengelola bisnisnya. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, keberhasilan seorang wirausahawan tidak hanya ditentukan oleh modal finansial dan keterampilan teknis, tetapi juga oleh kemampuan membangun dan memanfaatkan modal sosial yang ada (Coleman, 1988). Selain itu, faktor-faktor struktural seperti regulasi pemerintah, kebijakan ekonomi, dan perubahan sosial turut membentuk lanskap kewirausahaan di suatu wilayah (Scott, 2008). Dengan demikian, analisis dinamika sosial dalam kewirausahaan dari perspektif sosiologi ekonomi menjadi penting untuk memahami bagaimana interaksi sosial, jaringan, dan institusi memengaruhi perilaku wirausahawan serta perkembangan usaha mereka. Studi ini juga memberikan wawasan mengenai bagaimana modal sosial dan norma budaya dapat mendukung atau menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana faktor-faktor sosial dan ekonomi berinteraksi dalam membentuk pola kewirausahaan di masyarakat, serta bagaimana pemahaman sosiologi ekonomi dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, kewirausahaan dilihat sebagai produk dari dinamika sosial yang melibatkan berbagai faktor seperti jaringan sosial, budaya kewirausahaan, norma-norma sosial, serta kebijakan pemerintah yang mendorong atau menghambat perkembangan usaha (Granovetter, 1985). Teori *Embeddedness* yang dikemukakan oleh Granovetter (1985) menjelaskan bahwa keputusan ekonomi, termasuk kewirausahaan, sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial dalam masyarakat tempat individu tersebut berada. Dalam konteks Indonesia, faktor-faktor seperti

jaringan sosial keluarga, masyarakat lokal, serta kebijakan pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mendukung atau menghambat pengusaha dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka. Lebih lanjut, budaya kewirausahaan yang tumbuh dalam masyarakat juga berperan penting dalam menentukan sejauh mana individu memiliki keinginan untuk berwirausaha. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kerja keras, dan sikap solidaritas sering kali memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang mendukung kewirausahaan (Suryana, 2013). Namun, meskipun terdapat nilai-nilai tersebut, di banyak daerah, pekerjaan formal seringkali dianggap lebih prestisius dan stabil, sehingga mengurangi minat generasi muda untuk terjun ke dunia kewirausahaan (Wibowo, 2015). Ini menunjukkan bahwa selain faktor internal seperti keterampilan dan pengetahuan, faktor sosial yang mencakup norma, budaya, dan kebijakan pemerintah juga sangat mempengaruhi dinamika kewirausahaan.

Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis dinamika sosial dalam kewirausahaan dari perspektif sosiologi ekonomi, dengan fokus pada bagaimana faktor sosial, seperti jaringan sosial, budaya kewirausahaan, dan kebijakan pemerintah, mempengaruhi perkembangan kewirausahaan di Indonesia. Pendekatan sosiologi ekonomi ini memberi pemahaman lebih dalam bahwa kewirausahaan bukan hanya sekadar aktivitas individu, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi sosial dan struktur masyarakat yang lebih luas.

Artikel ini bertujuan untuk membahas dinamika sosial dalam kewirausahaan melalui pendekatan sosiologi ekonomi, yang melihat peran faktor sosial, budaya, dan ekonomi dalam mendorong atau menghambat kegiatan kewirausahaan di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kewirausahaan tidak hanya melibatkan keputusan pribadi tetapi juga

dipengaruhi oleh jaringan sosial, nilai-nilai budaya, serta kebijakan pemerintah yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode literatur review dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis berbagai studi dan tulisan yang relevan mengenai dinamika sosial dalam kewirausahaan dari perspektif sosiologi ekonomi. Sumber utama yang digunakan mencakup buku, jurnal akademik, laporan penelitian, dan artikel yang membahas hubungan antara kewirausahaan dan faktor sosial di Indonesia. Selain itu, artikel ini juga mengandalkan teori-teori sosiologi ekonomi untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kewirausahaan, serta tantangan dan peluang yang ada dalam masyarakat.

Data yang digunakan dalam artikel ini dikumpulkan dari berbagai referensi yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir, dengan fokus utama pada konteks Indonesia. Penulis melakukan analisis deskriptif terhadap temuan-temuan yang relevan untuk mengidentifikasi pola dan kesimpulan yang dapat ditarik dari kajian sosiologi ekonomi terhadap kewirausahaan.

HASIL DAN DISKUSI

Dinamika sosial dalam kewirausahaan di Indonesia menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara faktor individu, sosial, dan budaya. Faktor sosial yang paling menonjol dalam kewirausahaan adalah jaringan sosial dan norma budaya.

Jaringan Sosial dan Mobilitas Sosial

Jaringan sosial berperan penting dalam pengembangan usaha. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Granovetter (1985), jaringan sosial memberikan akses kepada pengusaha untuk mendapatkan modal, informasi pasar, dan dukungan yang sangat penting. Jaringan sosial memiliki peran penting dalam mobilitas sosial, karena melalui interaksi sosial individu dapat memperoleh akses terhadap berbagai

sumber daya yang mendukung perubahan status sosial. Dalam konteks sosiologi, jaringan sosial merujuk pada hubungan antarindividu yang terbentuk berdasarkan ikatan keluarga, persahabatan, hubungan kerja, atau komunitas tertentu. Granovetter (1973) dalam teorinya tentang *strength of weak ties* menjelaskan bahwa hubungan sosial yang tidak terlalu dekat (*weak ties*) justru memiliki peran besar dalam membuka peluang mobilitas sosial, seperti akses ke pekerjaan atau sumber daya ekonomi baru. Sebaliknya, hubungan sosial yang kuat (*strong ties*), seperti keluarga dan teman dekat, sering kali memberikan dukungan emosional dan material tetapi cenderung membatasi akses ke informasi yang lebih luas.

Mobilitas sosial sendiri merujuk pada perpindahan individu atau kelompok dalam stratifikasi sosial, baik ke atas (mobilitas sosial naik) maupun ke bawah (mobilitas sosial turun) (Sorokin, 1959). Jaringan sosial dapat memfasilitasi mobilitas ini melalui mekanisme pertukaran informasi, rekomendasi pekerjaan, dan dukungan finansial (Lin, 1999). Dalam studi Bourdieu (1986) tentang modal sosial, ia menekankan bahwa individu yang memiliki koneksi sosial yang luas cenderung lebih mudah mengakses modal ekonomi dan budaya yang dapat meningkatkan posisi sosial mereka. Sebagai contoh, seseorang dari latar belakang ekonomi rendah dapat memperoleh pekerjaan dengan lebih mudah jika memiliki koneksi dengan orang-orang dalam jaringan yang memiliki pengaruh di sektor industri tertentu.

Selain itu, dalam masyarakat modern, perkembangan teknologi telah memperluas jaringan sosial melalui media sosial dan platform digital, yang memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk terhubung dan berbagi informasi (Castells, 2010). Namun, meskipun jaringan sosial dapat menjadi alat untuk meningkatkan mobilitas sosial, tetap ada kendala struktural yang membatasi akses individu tertentu terhadap

jaringan yang lebih berpengaruh. Faktor seperti kelas sosial, pendidikan, dan diskriminasi masih memainkan peran dalam menentukan sejauh mana individu dapat memanfaatkan jaringan sosial untuk mobilitas mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan institusi sosial untuk menciptakan kebijakan yang memperluas akses terhadap jaringan sosial yang lebih inklusif, sehingga mobilitas sosial dapat terjadi lebih merata di masyarakat.

Di Indonesia, jaringan sosial sering kali terdiri dari keluarga, teman, dan komunitas yang lebih besar. Suryana (2013) mengungkapkan bahwa kewirausahaan di Indonesia seringkali dimulai dengan dukungan keluarga atau teman dekat, yang membantu memberikan kepercayaan dan modal awal. Jaringan sosial ini menjadi fondasi penting bagi pengusaha dalam membangun usaha mereka.

Budaya Kewirausahaan dan Nilai Sosial

Budaya kewirausahaan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi dalam suatu masyarakat. Budaya ini mencerminkan nilai-nilai, norma, dan sikap yang mendukung aktivitas kewirausahaan, seperti keberanian mengambil risiko, inovasi, kreativitas, serta semangat kerja keras (Hisrich, Peters, & Shepherd, 2017). Di banyak negara, budaya kewirausahaan berkembang melalui pendidikan, kebijakan pemerintah, serta lingkungan sosial yang mendukung inisiatif bisnis dan inovasi (Kuratko, 2016). Selain itu, budaya kewirausahaan juga sangat berkaitan dengan nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Nilai sosial dalam konteks kewirausahaan mencakup aspek seperti tanggung jawab sosial, etika bisnis, serta dampak positif terhadap komunitas (Zahra, Gedajlovic, Neubaum, & Shulman, 2009). Seorang wirausahawan yang sukses tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan dampak

bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar (Porter & Kramer, 2011). Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa ekosistem kewirausahaan yang sehat sering kali berakar pada nilai-nilai sosial yang mendukung inklusivitas, kolaborasi, dan kesejahteraan bersama (Acs, Autio, & Szerb, 2014). Oleh karena itu, penguatan budaya kewirausahaan harus diiringi dengan penguatan nilai sosial agar bisnis yang berkembang tidak hanya berkontribusi pada ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Budaya Indonesia yang mengutamakan gotong royong dan kerjasama seringkali mendukung berkembangnya kewirausahaan. Wibowo (2015) menyatakan bahwa dalam masyarakat Indonesia, kewirausahaan yang melibatkan banyak orang dalam komunitas sering kali lebih berhasil karena adanya kerjasama yang baik antar anggota komunitas. Di sisi lain, masyarakat yang lebih mengutamakan pekerjaan formal sebagai simbol status sosial terkadang kurang menghargai kewirausahaan sebagai pilihan hidup, yang dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan budaya kewirausahaan yang inklusif.

Pendidikan dan Kesadaran Kewirausahaan

Pendidikan memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran kewirausahaan di kalangan individu, terutama dalam konteks ekonomi modern yang menuntut kreativitas dan inovasi. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan tentang bisnis dan manajemen, tetapi juga membentuk pola pikir serta keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses (Fayolle & Gailly, 2015). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan kewirausahaan yang efektif dapat meningkatkan minat individu untuk berwirausaha dengan membangun kepercayaan diri dan mengembangkan

keterampilan *problem-solving* yang diperlukan dalam dunia bisnis (Nabi et al., 2017). Selain itu, pendidikan kewirausahaan juga berperan dalam membentuk mindset proaktif dan adaptif terhadap perubahan pasar serta tantangan yang dihadapi dalam dunia bisnis (Rae, 2010). Kesadaran kewirausahaan yang terbentuk melalui pendidikan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Audretsch, 2012). Dalam konteks Indonesia, penguatan kurikulum kewirausahaan di berbagai jenjang pendidikan menjadi salah satu strategi penting dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih dinamis dan berkelanjutan. Program-program seperti kewirausahaan berbasis proyek, inkubasi bisnis di universitas, serta pelatihan keterampilan berbasis teknologi telah terbukti meningkatkan kesiapan individu dalam memulai dan mengelola usaha mereka sendiri (Gielnik et al., 2015). Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan kewirausahaan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Pendidikan kewirausahaan menjadi faktor penting dalam memfasilitasi pengembangan usaha. Fatimah (2017) menekankan bahwa dengan peningkatan kesadaran dan pendidikan kewirausahaan, masyarakat akan lebih terampil dalam menjalankan usaha mereka. Banyak program pendidikan kewirausahaan yang kini telah diselenggarakan di berbagai tingkat pendidikan, dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Walaupun demikian, Suroso (2016) mencatat bahwa kesenjangan dalam kualitas pendidikan kewirausahaan di daerah pedesaan dan perkotaan masih menjadi masalah yang perlu diatasi.

Kebijakan Pemerintah dan Pemberdayaan Ekonomi

Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang mendukung. Suryana (2013) menyatakan bahwa berbagai kebijakan yang mendukung wirausaha, seperti pembiayaan mikro dan program pengembangan UMKM, telah terbukti meningkatkan jumlah wirausahawan di Indonesia. Namun, tantangan besar dalam implementasi kebijakan ini adalah ketidakmerataan akses terhadap pembiayaan dan fasilitas kewirausahaan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Menurut Todaro dan Smith (2020), kebijakan ekonomi yang inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi kelompok ekonomi bawah dan menengah. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi, seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mendukung daya beli masyarakat, serta berbagai pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar mereka mampu meningkatkan daya saing.

Selain itu, kebijakan dalam bentuk deregulasi dan reformasi birokrasi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut laporan Bank Dunia (2022), kemudahan berusaha yang ditingkatkan melalui kebijakan pemerintah, seperti pemangkasan perizinan usaha dan digitalisasi layanan publik, mampu meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat, terutama bagi sektor informal. Pemerintah juga berperan dalam mendukung ekonomi berbasis digital dengan menciptakan regulasi yang mendorong literasi digital dan pemanfaatan teknologi dalam aktivitas ekonomi masyarakat (McKinsey, 2021).

Pemberdayaan ekonomi tidak hanya bertumpu pada bantuan finansial, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Studi yang dilakukan oleh Amartya Sen (1999) menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi harus selaras dengan peningkatan kapabilitas individu agar masyarakat dapat mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri dan berkelanjutan.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi tetap ada, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, ketimpangan akses terhadap bantuan ekonomi, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan adanya kebijakan yang tepat sasaran dan dukungan dari berbagai pihak, pemberdayaan ekonomi dapat menjadi pilar utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Kajian ini menganalisis dinamika sosial dalam kewirausahaan dari perspektif sosiologi ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa kewirausahaan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu dan ekonomi, tetapi juga oleh jaringan sosial, budaya kewirausahaan, pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Jaringan sosial memberikan dukungan penting bagi pengusaha, baik dalam bentuk modal, akses informasi, maupun dukungan moral. Hubungan sosial yang kuat dapat membantu seseorang mendapatkan peluang usaha yang lebih baik. Budaya gotong royong dan solidaritas sosial di Indonesia dapat menjadi pendorong kewirausahaan. Namun, masih ada tantangan dalam mengubah persepsi masyarakat yang lebih mengutamakan pekerjaan formal sebagai simbol status sosial. Pendidikan memainkan

peran penting dalam membangun kesadaran dan keterampilan kewirausahaan. Meski sudah ada program pendidikan kewirausahaan di berbagai tingkat, masih terdapat kesenjangan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kebijakan pemerintah seperti program pembiayaan mikro dan pemberdayaan UMKM terbukti mendukung pertumbuhan kewirausahaan. Namun, masih ada tantangan dalam implementasi, terutama dalam pemerataan akses di daerah terpencil.

Sebagai rekomendasi, kajian literatur ini menekankan pentingnya sinergi antara individu, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan akses terhadap pendidikan, modal, dan jaringan sosial yang lebih luas akan membantu pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan di Indonesia.

REFERENSI

- Abduh, A., Marliyah, M., & Siregar, S. (n.d.). Instrumen Keuangan Sosial Islam Dan Keberlanjutan Lingkungan (SDGs 13). *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 5(1), 42–63.
- Acs, Z. J., Autio, E., & Szerb, L. (2014). National Systems of Entrepreneurship: Measurement Issues and Policy Implications. *Research Policy*, 43(3), 476–494.
- Ain, Q. ul, Yousaf, T., & Tahir, M. A. (2024). Decentralization policies and sustainable rural development: A path to eradicating poverty (SDG 1) and hunger (SDG 2). *Sustainable Development*.
- Al-Qudah, A. A., Al-Okaily, M., & Alqudah, H. (2022). The relationship between social entrepreneurship and sustainable development from economic growth perspective: 15 'RCEP' countries. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(1).
- Andrianarison, F. (2022). Unravelling the linkage between food security, poverty reduction, and education for sustainable development. *The Journal of Development Studies*, 58(11), 2198–2221.
- Anh, D. B. H., Duc, L. D. M., Yen, N. T. H., Hung, N. T., & Tien, N. H. (2022). Sustainable development of social entrepreneurship: evidence from Vietnam. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 45(1), 62–76.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Cardella, G. M., Hernández-Sánchez, B. R., & Sánchez-García, J. C. (2020). *Women entrepreneurship: A systematic review to outline the boundaries of scientific literature*. *Frontiers in Psychology*, 11, 1557.
- Canestrino, R., Ćwiklicki, M., Magliocca, P., & Pawełek, B. (2020). Understanding social entrepreneurship: A cultural perspective in business research. *Journal of Business Research*, 110, 132–143.
- Davarpanah, A., Babaie, H., & Dhakal, N. (2023). Semantic modeling of climate change impacts on the implementation of the UN sustainable development goals related to poverty, hunger, water, and energy. *Earth Science Informatics*, 16(1), 929–943.
- Dees, J. G. (2007). Taking social entrepreneurship seriously. *SOCIETY-NEW BRUNSWICK*, 44(3), 24.
- Diaz-Sarachaga, J. M., & Ariza-Montes, A. (2022). The role of social entrepreneurship in the attainment of the sustainable development goals. *Journal of Business Research*, 152, 242–250.

- Fatimah, S. (2017). Pendidikan Kewirausahaan dan Pengembangan Karakter Siswa di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(2), 15-28.
- Granovetter, M. S. (1973). The strength of weak ties. *American Journal of Sociology*, 78(6), 1360–1380.
- Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481-510.
- Gupta, P., Chauhan, S., Paul, J., & Jaiswal, M. P. (2020). Social entrepreneurship research: A review and future research agenda. *Journal of Business Research*, 113, 209–229.
- Halkos, G., & Gkampoura, E.-C. (2021). *Where do we stand on the 17 Sustainable Development Goals? An overview on progress*. Economic Analysis and Policy, 70, 94–122.
- Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2017). *Entrepreneurship*. McGraw-Hill Education.
- Kickul, J., & Lyons, T. S. (2020). Understanding social entrepreneurship: The relentless pursuit of mission in an ever changing world. Routledge.
- Kundu, D., & Gupta, D. (2024). Building a fairer future: joint actions for poverty, hunger and inequality reduction by G20 nations.
- Kuncoro, M. (2012). *Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN).
- Lile, R., Ocnean, M., & Balan, I. M. (2023). Challenges for Zero Hunger (SDG 2): Links with Other SDGs. *Zero Hunger*, 9.
- Lin, N. (1999). Social networks and status attainment. *Annual Review of Sociology*, 25(1), 467–487.
- McKinsey & Company. (2021). *The Future of Digital Economy in Emerging Markets*. McKinsey Global Institute.
- Nabi, G., Liñán, F., Fayolle, A., Krueger, N., & Walmsley, A. (2017). The impact of entrepreneurship education in higher education: A systematic review and research agenda. *Academy of Management Learning & Education*, 16(2), 277-299.
- Pérez-Peña, M. del C., Jiménez-García, M., Ruiz-Chico, J., & Peña-Sánchez, A. R. (2021). Analysis of research on the SDGs: the relationship between climate change, poverty and inequality. *Applied Sciences*, 11(19), 8947.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value. *Harvard Business Review*, 89(1/2), 62-77.
- Rosca, E., Agarwal, N., & Brem, A. (2020). *Women entrepreneurs as agents of change: A comparative analysis of social entrepreneurship processes in emerging markets*. Technological Forecasting and Social Change, 157, 120067.
- Sakinah, N. S. N., Arifin, T., & Abdal, A. (2023). Peran Sociopreneur dalam Transformasi Sosial dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Mikro Perspektif Sosiologi dan Antropologi. *Strata Social and Humanities Studies*, 1(2), 117–126.
- Saragih, R. (2017). Membangun usaha kreatif, inovatif dan bermanfaat melalui penerapan kewirausahaan sosial. *Jurnal Kewirausahaan*, 3(2), 26–34.
- Schmiedeknecht, M. H. (2020). Social innovation and entrepreneurship supporting the sustainable development goals (SDGs)—fostering social value creation. *The Future of the UN Sustainable Development Goals: Business Perspectives for Global Development in 2030*, 211–225.

- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sofia, I.P. (2017). Konstruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) sebagai gagasan inovasi sosial bagi pembangunan perekonomian. *Widyakala Journal: Journal of Pembangunan Jaya University*, 2(1), 2–23.
- Sorokin, P. A. (1959). *Social and cultural mobility*. Free Press.
- Suroso, W. (2016). Budaya Kewirausahaan di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(3), 123-136.
- Suryana, Y. (2013). *Kewirausahaan: Memulai dan Mengembangkan Usaha*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, A. (2018). Kapital Sosial dan Perannya dalam Kewirausahaan. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 6(3), 45-60.
- Soetomo, B. (2007). *Sosiologi Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Pearson.
- Wibowo, A. (2015). Budaya Gotong Royong dan Pengaruhnya terhadap Kewirausahaan di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya*, 12(1), 45-58.
- Zahra, S. A., Gedajlovic, E., Neubaum, D. O., & Shulman, J. M. (2009). A Typology of Social Entrepreneurs: Motives, Search Processes and Ethical Challenges. *Journal of Business Venturing*, 24(5), 519-532.
- Purnama, N. I. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 17(1), 65.
- Rafi'i, M., & Zaid, Z. (2021). Building Social Welfare Through Social Security Based on The SocioEconomic Justice During COVID-19 Pandemic Crisis. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 14(2), 138–152. <https://doi.org/10.12962/J24433527.V14I2.9477>.
- Wijayanto, R. D. (2010). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2008, *Skripsi S1, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Zaid, Z., & Fikri Aufa, D. M. (2022). Peran Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 15(1), 89–99. <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14282>